

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kabupaten Nagekeo berdiri pada tahun 2006 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Masyarakat Nagekeo memisahkan diri dari Kabupaten Ngada dengan alasan bahwa Kabupaten Ngada memiliki wilayah yang sangat luas sehingga pemerataan pembangunan sulit tercapai apa lagi daerah Nagekeo berada cukup jauh dari Ibu kota Kabupaten Ngada. Selain itu masyarakat Nagekeo ingin mendekatkan pelayanan publik, karena masyarakat Nagekeo menilai semua kepentingan dan pelayanan publik Kabupaten Ngada terlalu terpusat di Kota Bajawa (Ibu kota Kabupaten Ngada).

Kabupaten Nagekeo adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih

saja kurang baik. Dimana dilihat dari realisasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2013-2017.

Berikut adalah data APBD Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2013-2017.

Tabel 1.1
Ringkasan APBD Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2013-2017

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2013			TAHUN ANGGARAN 2014			TAHUN ANGGARAN 2015			TAHUN ANGGARAN 2016			TAHUN ANGGARAN 2017		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	474.424.703.090,00	439.856.971.106,56	92,71	540.116.425.000,00	532.770.485.066,46	98,64	660.712.078.657,63	629.109.735.892,25	95,22	752.686.337.383,00	722.085.467.322,77	95,93	774.518.052.100,00	759.738.196.694,67	98,09
Pendapatan Asli Daerah	21.413.158.000,00	15.764.401.082,56	73,62	23.945.256.000,00	24.618.925.077,46	102,81	26.540.539.098,63	28.618.512.239,25	107,83	31.015.364.633,00	29.671.653.790,77	95,67	46.160.609.301,00	46.163.603.353,96	100,01
Pendapatan Transfer	453.011.545.090,00	424.092.570.024,00	93,62	515.149.969.000,00	507.171.759.989,00	98,45	599.351.660.753,00	599.351.660.753,00	94,87	719.142.972.750,00	682.440.256.443,00	94,90	726.585.442.799,00	712.766.182.340,71	98,10
BELANJA	534.013.179.128,77	426.714.070.641,20	79,91	604.672.871.462,13	491.654.337.359,00	81,31	762.082.416.691,22	612.658.139.493,60	80,39	867.685.551.382,24	775.936.291.838,80	89,43	838.522.761.259,21	736.553.625.109,94	87,84
Belanja Operasi	388.366.381.816,00	399.193.317.388,00	87,34	448.488.439.125,00	380.283.014.850,00	84,79	485.264.088.879,00	427.803.977.379,00	88,16	575.099.748.969,00	533.496.400.564,00	92,78	599.504.894.713,21	544.897.037.827,00	90,89
Belanja Modal	132.873.595.963,00	86.740.958.253,20	65,28	141.375.761.101,00	99.141.405.957,00	70,13	270.464.980.321,00	184.112.592.114,60	68,07	290.144.011.513,00	241.355.067.525,80	83,18	235.858.604.546,00	190.180.029.282,94	80,63
Belanja Tak Terduga	12.773.201.349,77	779.795.000,00	6,10	14.808.671.236,13	12.229.916.552,00	82,59	6.353.347.491,22	741.570.000,00	11,67	1.927.899.900,24	480.932.749,00	24,95	2.500.000.000,00	817.296.000,00	32,69
SURPLUS/DEFISIT	(59.588.476.038,77)	13.142.900.465,36	(22,06)	(64.556.446.462,13)	41.116.147.707,46	(63,69)	(101.370.338.033,59)	16.451.596.398,65	(16,23)	(114.999.213.999,24)	(53.850.824.516,03)	46,83	(64.004.709.159,21)	23.184.571.584,73	(36,22)
PEMBIAYAAN															
Penerimaan Daerah	63.207.526.038,77	61.902.545.996,77	97,94	73.545.446.462,13	72.709.190.326,13	98,86	113.370.338.033,59	112.500.174.656,59	99,23	116.499.213.999,24	117.355.533.675,24	100,74	64.004.709.159,21	64.854.621.619,21	101,33
Pengeluaran Daerah	3.619.050.000,00	3.000.000.000,00	82,89	8.989.000.000,00	1.955.000.000,00	21,75	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	0	0	0	0	-
Pembiayaan Netto	59.588.476.038,77	58.902.545.996,77	98,85	64.556.446.462,13	70.754.190.326,13	109,60	101.370.338.033,59	100.500.174.656,59	99,14	114.999.213.999,24	117.355.533.675,24	102,05	64.004.709.159,21	64.854.621.619,21	101,33
Sisa Lebih Perhitungan															
Anggaran (SiLPA)	0	72.045.446.462,13	0,00	0	111.870.338.033,59	0	0	116.951.771.055,24	0	0	63.504.709.159,21	0	0	88.039.193.203,94	0

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
Provinsi NTT

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Nagekeo dari Tahun 2013-2017 dimana pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2013 realisasi pendapatan sebesar Rp 439.856.971.106 pada tahun 2014 realisasi pendapatannya sebesar Rp 532.770.485.066 dan pada tahun 2015 realisasi pendapatannya sebesar Rp 629.109.735.892 sedangkan pada tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar Rp 722.085.467.322 dan pada tahun 2017 mengalami realisasi pendapatannya adalah Rp 759.738.196.694.

Pada bagian belanja daerah total realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Nagekeo tahun 2013 adalah sebesar Rp 426.714.070.641 pada tahun 2014 realisasi belanja daerah sebesar Rp 491.654.377.359 kemudian pada tahun 2015 realisasi belanja sebesar Rp 612.658.139.493 dan tahun 2016 realisasi pendapatannya sebesar Rp 775.936.291.838 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan angka realisasinya sebesar Rp 736.553.625.109.

Sedangkan pada pembiayaan daerah bagian penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2013 total realisasinya sebesar Rp 63.207.526.038 pada tahun 2014 realisasinya sebesar Rp 72.709.190.326 kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 112.500.174.656 dan pada tahun 2016 realisasinya sebesar Rp 117.355.533.675 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar Rp 64.854.621.619. Selanjutnya dibagian pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2013 realisasinya sebesar Rp 3.000.000.000 dan pada tahun 2014 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp 1.955.000.000 dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yang sangat

besar yaitu sebesar Rp 12.000.000.000 sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah.

Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada pemerintahan Kabupaten Nagekeo . Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2013 – 2017 ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2013-2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggran 2013-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.